MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

SURAT TUGAS

Nomor : 242/DJMT/ST.KP7.1/VIII/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan zona integritas dan meningkatkan jumlah satuan kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara perlu melaksanakan kegiatan pendampingan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dasar : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 105/DJMT/KEP/OT1.1/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan dan Penetapan Tim Implementasi dan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Memberi Tugas

Kepada :

No	Nama dan NIP/NRP	Jabatan dan Satuan Kerja	Gol/ Pangkat	Tanggal
1.	Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Marsda TNI	22 sd. 23 Agustus 2024
2.	Retno Ariyani, S.H., M.H./ 198403072008052002	Hakim Yustisial	III/d	22 sd. 24 Agustus 2024
3.	Agus Abdur Rahman, S.H., M.H./ 198208022009041002	Hakim Yustisial	III/d	22 sd. 24 Agustus 2024
4.	Dheo Agustian S., S.H./ 119526	Klerek – Pengelola Layanan Operasional	Serka	22 sd. 24 Agustus 2024
5.	Muhammad Hilman Fikri/ 61819606547712	Klerek - Pengemudi Dirjen Badilmiltun	Pratu	22 sd. 23 Agustus 2024
6.	Ahmad Sabillah, A.Md.	PPNPN	-	22 sd. 24 Agustus 2024

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk : Melaksanakan kegiatan Pendampingan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada satuan kerja di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara